



Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Man Way Bob Distrik Muting Kabupaten Merauke

Natalia Suryani Purba¹, Eko Rachmat Saputro², Dapot Pardamean Saragih³, Bonefasius Facunda⁴

^{1,2,3,4} Universitas Musamus, Jl Kamizaun Mopah Lama, Merauke 99611, Indonesia

Abstract

Village funds are used to finance development and community empowerment aimed at improving the welfare of rural communities, the importance of a good understanding of the mechanisms for managing village funds that are right on target and useful. The use of village funds in Man way Bob village is carried out by the village government and is often unknown to the community, the discussion of the plan for using village funds is not informed to the community in general so that the community does not know the amount of village funds provided by the government. Some of the implementation of work programs in Man Way Bob village did not run in accordance with what was expected and needed by the community. Administration in the village office of man way bob muting district in administrative management cannot be managed properly, due to the lack of availability of facilities in administrative management, as well as the lack of human resources, who cannot operate computers. The accountability reporting carried out in the village of man way bob is not transparent to the community so that the community tends to be apathetic about what is happening. There is no mechanism or information on how spending is controlled, there is no explanation of supervision and evaluation after the implementation of the village fund use program. This study aims to describe the Management of Village Fund Allocation in Improving the Welfare of the Man Way Bob Village Community, Muting District, Merauke Regency. This research was conducted for approximately 3 months, the research location was in Man Way Bob Village, Muting District, Merauke Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with technical data analysis using sources according to Denzin and Lincoln, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research on the Management of Village Fund Allocation in Improving the Welfare of the Man Way Bob Village Community, Muting District, Merauke Regency are still not optimal, the lack of transparency regarding the management of village funds and the publication of financial reports and plans for the use of village funds to the community. in the implementation, the community is not sufficiently involved because of the lack of socialization in order to improve the welfare of the village community.

Keywords: Village Fund; Village Fund Management; Community Welfare

Abstrak

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pentingnya pemahaman yang baik tentang mekanisme pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan bermanfaat. Penggunaan dana desa di kampung Man way Bob

Kata Kunci: Dana Desa; Pengelolaan Dana Kampung; Kesejahteraan Masyarakat.

dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan sering kali tidak diketahui oleh masyarakat, pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui besaran dana desa yang di berikan pemerintah. Beberapa pelaksanaan program kerja di kampung Man Way Bob tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan serta di butuhkan oleh masyarakat. Penatausahaan di kantor kampung Man Way Bob distrik muting dalam pengelolaan administrasi belum dapat dikelola dengan baik, di karenakan kurangnya ketersediaan fasilitas dalam pengelolaan administrasi, serta kurangnya sumber daya manusia, yang tidak dapat mengoperasikan komputer. Pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan di kampung Man Way Bob tidak transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat pun cenderung apatis dengan apa yang terjadi. Tidak ada mekanisme atau informasi tentang bagaimana pengeluaran dikendalikan, Tidak ada penjelasan mengenai pengawasan dan evaluasi setelah pelaksanaan program penggunaan dana kampung. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Man Way Bob Distrik Muting Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, lokasi penelitian di Kampung Man Way Bob distrik muting kabupaten merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknis analisis data menggunakan sumber menurut Denzin dan Lincoln yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Man Way Bob Distrik Muting Kabupaten Merauke masih belum optimal, kurangnya transparansi mengenai pengelolaan dana kampung serta publikasikan laporan keuangan dan rencana penggunaan dana kampung kepada masyarakat. dalam pelaksanaannya pun masyarakat tidak cukup terlibat karena kurangnya sosialisasi guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

1. Pengantar

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan. data penduduk miskin yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dalam kalangan politisi dan akademisi. Menanggapi masalah tersebut, strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Kesejahteraan masyarakat desa merujuk pada kondisi dimana penduduk desa merasa hidup dalam keadaan yang baik sejahtera, dan memenuhi berbagai aspek kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi kesejatan, pendidikan, lingkungan sosial dan budaya. Implementasi kebijakan dana desa menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan kegiatan utama desa yaitu pembangunan pada idang sarana-prasarana maupun kesejahteraan masyarakat. (Tirtanadi, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan untuk mensejahterakan rakyat desa dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu peraturan pemerintahan

Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memperkuat keberadaan desa yang ada sebagai salah satu dari berbagai Lembaga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga dapat memperjelas tugas, fungsi peran suatu desa dalam mengelola, menjalankan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat desanya guna tercapainya cita-cita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. (Uamang, 2018). Pengelolaan Alokasi Desa dapat membantu mengatasi kesenjangan pembangunan serta meningkatkan kemandirian masyarakat apabila di lakukan dengan tepat.

Kampung Man Way Bob, yang terletak di Distrik Muting Kabupaten Merauke salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari (APBN), kampung ini juga merupakan salah satu daerah pedesaan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Masyarakat kampung ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang memadai, serta minimnya infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan strategi yang tepat dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di kampung Man Way Bob melalui pengelolaan dana desa yang tepat. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan kepelaksanaan setelah dilaksanakan akan di pertanggungjawabkan.

Kampung Man Way Bob merupakan desa yang berada di Kecamatan Muting, kabupaten Merauke, provinsi Papua Selatan. Desa tersebut berdiri pada tahun 1999. Dengan jumlah penduduk 410 jiwa dan profesi mayoritas penduduknya 80% petani karena masih banyak peladangan. Sebagai sebuah desa, Man Way Bob juga mengelola dana desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014. Dana desa pertama kali di Indonesia sejak tahun 2015 sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa turun ke Desa Man Way Bob pada tahun 2015 pada masa pemerintahan Bapak sri riyanto (2015-sekarang).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dana Desa yang turun di Desa Man Way Bob pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 844.807.000 dan total pendapatan Desa keseluruhan secara umum adalah sebesar Rp. 1.436.439.815 Pada tahun 2022 Dana Desa yang turun di Desa Man Way Bob yaitu sebesar Rp. 883.562.000 dengan total pendapatan keseluruhan yaitu sebesar Rp. 1.647.442.348. Sedangkan pada tahun 2023 Dana Desa yang turun sebesar Rp. 762.086.000 dan dengan pendapatan Desa keseluruhan yaitu sebesar Rp. 1.345.321.765

2. Kajian Literatur/Kerangka Teori

Konsep Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Surwardane (2015:94) mendefinisikan bahwa: "Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengoorganisasian dan pengarahannya manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk suatu tujuan." Lebih lanjut Bastian (2015:3) mengemukakan bahwa fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Muhammad Iqbal (2016) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa harus berlandaskan pada prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran.

Bambang Brodjonegoro (2014) menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Ia berpendapat bahwa dana desa harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat

yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparatur desa didalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan untuk Mensejahterakan masyarakat desa.

Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tentu akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Peningkatan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014.

Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2). Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992, dalam Nuryani 2007).

Kesejahteraan dipandang sebagai keadaan yang lebih baik. Pengertian dari kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik (Friedlander 1961). Sedangkan menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial mencerminkan kondisi dan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Seiring dengan perubahan zaman, konsep kesejahteraan sosial juga mengalami

perkembangan, menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Pemahaman yang lebih holistik tentang kesejahteraan sosial mencakup tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Midgley (2018), konsep kesejahteraan sosial bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menekankan pada keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Pemikiran ini menonjolkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya dilihat dari sudut ekonomi semata, tetapi juga sebagai hasil dari distribusi sumber daya dan peluang yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Prinsip Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kollé (1974) dalam Bintarto (1989), Kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui beberapa aspek kehidupan, diantaranya:

1. Kualitas hidup dari segi materi, meliputi keadaan tempat tinggal dan pemenuhan gizi pada pangan
2. Kualitas hidup dari segi fisik, meliputi Kesehatan dan keadaan lingkungan sekitar
3. Kualitas hidup dari segi mental, meliputi fasilitas pendidikan
4. Kualitas hidup dari segi spiritual, meliputi moral, etika dan keserasian penyesuaian.

Sedangkan Prinsip utama Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) dalam mengetahui tingkat kesejahteraan Rumah tangga dapat menggunakan beberapa indikator diantaranya:

- a) Tingkat pendapatan keluarga
- b) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
- c) Tingkat pendidikan keluarga
- d) Tingkat Kesehatan keluarga
- e) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari sejumlah prinsip yang membimbing

pembangunan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai kualitas hidup yang optimal bagi semua individu di suatu masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan mengelola atau memelihara dunia sosial mereka (Dedy,2003:3).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti yaitu menggunakan deskriptif kualitatif yang mana hasil dari penelitian berupa penulisan dan kata yang menggambarkan bagaimana Implementasi pengolahan alokasi dana kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung Man Way Bob distrik muting kabupaten Merauke.

Menurut (Sugiyono, 2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. artinya dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya seperti tingkah laku, komunikasi, kontak sosial, cara pandang dan sebagainya secara menyeluruh dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu kejadian khusus yang alamiah, artinya dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka (Bungin,2003:42).

Pertimbangan penulis menggunakan metode Kualitatif adalah untuk meneliti secara mendalam, menyajikan data secara akurat, dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas. Penulis berharap dapat menggambarkan dan menganalisis bagaimana pengolahan alokasi dana kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung Man Way Bob distrik muting kabupaten Merauke.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa adalah proses yang penting dalam konteks pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Berikut adalah beberapa poin teori tentang pengelolaan alokasi dana desa, Inti dari pengelolaan dana desa adalah transparansi dalam penggunaan dana serta akuntabilitas terhadap penggunaan tersebut. Desa harus memiliki sistem pelaporan yang jelas dan terbuka untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai kepala kampung saya melakukan perencanaan secara cermat untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan mendesak dan aspirasi masyarakat, menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa dengan melakukan rapat terbuka dan menyediakan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat. melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka. memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Dana desa kami alokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan juga untuk meningkatkan pelayanan public seperti kesehatan dan pendidikan.”

Selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan bamuskam kampung Man Way Bob:

“saya selalu mengikuti musyawarah kampung Man Way Bob dan selalu ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan kampung, mengenai pengelolaan dana kampung adek bisa liat sendiri bagaimana pembangunan di kampung kita ini”.

Dan selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai sekretaris kampung Man Way Bob saya Membuat rencana anggaran yang jelas berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, dan Memastikan semua dana desa yang tersedia dikumpulkan dan dicatat dengan benar. Mengalokasikan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, dengan memprioritaskan proyek dan program yang memberikan manfaat langsung bagi penduduk kampung. saya Menyediakan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa. kemudian Melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi penggunaan dana. dan juga Melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area perbaikan.”

Pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur desa, integritas dan system pengawasan

yang baik. dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercapai. Di kampung Man Way Bob distrik muting kabupaten merauke mengenai pengelolaan dana desa belum optimal di karenakan kurangnya transparansi pengelolaan dana desa dari aparat kampung kepada masyarakat kampung. Dan kurangnya Menyediakan akses terbuka terhadap informasi keuangan desa melalui publikasi laporan keuangan dan rapat terbuka dengan masyarakat. Selain itu aparat kampung Man Way Bob Belum Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana desa dan pencapaian hasil yang diharapkan masyarakat. Dan aparat kampung kurang begitu memperhatikan aspek berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan, dan sosial.

4.2. Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah proses sistematis untuk merumuskan tujuan dan cara mencapainya sebelum melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Tahap-tahap dalam perencanaan umumnya *meliputi*, Tahap awal perencanaan adalah mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan atau tujuan yang ingin dicapai. Ini melibatkan pengumpulan informasi dan analisis situasi yang ada, Setelah masalah atau tujuan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan kepala kampung Man Way Bob terkait tahap perencanaan:

“iya dek, sebagai kepala kampung saya melakukan perencanaan secara cermat untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan mendesak dan aspirasi masyarakat, menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa dengan melakukan rapat terbuka dan menyediakan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat. melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka. memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah

penyalahgunaan dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Dana desa kami alokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan juga untuk meningkatkan pelayanan public seperti kesehatan dan pendidikan.”

Wawancara selanjutnya yang di lakukan peneliti dengan bamuskam kampung Man Way Bob:

“saya selalu mengikuti musyawarah kampung man way bob dan selalu ikut serta dalam kegiatan yang di selenggarakan pemerintahan kampung, mengenai pengelolaan dana kampung adek bisa liat sendiri bagaimana pembangunan di kamung kita ini”.

Wawancara ketiga yang di lakukan peneliti dengan sekertaris kampung Man Way Bob menghasilkan jawaban sebagai berikut:

“iya dek, sebagai sekertaris kampung man way bob saya Membuat rencana anggaran yang jelas berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, dan Memastikan semua dana desa yang tersedia dikumpulkan dan dicatat dengan benar. Mengalokasikan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, dengan memprioritaskan proyek dan program yang memberikan manfaat langsung bagi penduduk kampung. saya Menyediakan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa. kemudian Melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi penggunaan dana. dan juga Melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area perbaikan.”

Dan Berikut ini wawancara ke empat yang di lakukan peneliti dengan kaur pembangunan kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai kaur pembangunan Mulailah dengan menyusun rencana anggaran yang jelas berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan kampung. Selalu dokumentasikan setiap penggunaan dana secara rinci dan transparan untuk mempermudah pemantauan dan audit. kami juga Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar memenuhi kebutuhan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. kemudian Lakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek dan evaluasi terhadap penggunaan dana untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. lalu Sampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah kabupaten atau distrik serta kepada masyarakat tentang penggunaan dana dan kemajuan proyek-proyek pembangunan. dan Jalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga keuangan atau ahli teknis, untuk mendukung pengelolaan dana yang lebih efektif dan profesional.”

Perencanaan adalah proses fundamental dalam manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan menjadi dasar bagi fungsi manajemen lainnya dan merupakan langkah pertama yang menentukan arah dan strategi organisasi.

Mengenai tahap perencanaan, Pegawai kantor kampung Man Way Bob distrik muting belum

begitu Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas local, Mengelola dana desa dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan memastikan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan masyarakat yang dimana perencanaan pengelolaan keuangan kampung merupakan hal yang sangat penting untuk di bahas bersama dengan masyarakat.

4.3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merujuk kepada proses atau langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk menjalankan suatu rencana atau tindakan. Berikut adalah teori umum tentang tahap pelaksanaan. Tahap ini melibatkan penyusunan rencana yang jelas dan terinci mengenai apa yang perlu dilakukan, siapa yang terlibat, sumber daya yang diperlukan, dan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan ini mencakup identifikasi masalah, penentuan tujuan, dan pembuatan strategi pelaksanaan.

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan kepala kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai kepala kampung saya melakukan perencanaan secara cermat untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan mendesak dan aspirasi masyarakat, menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa dengan melakukan rapat terbuka dan menyediakan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat. melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka. memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Dana desa kami alokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan juga untuk meningkatkan pelayanan public seperti kesehatan dan pendidikan.”

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan bamuskam kampung Man Way Bob:

“saya selalu mengikuti musyawarah kampung man way bob dan selalu ikut serta dalam kegiatan yang di selenggarakan pemerintahan kampung, mengenai pengelolaan dana kampung adek bisa liat sendiri bagaimana pembangunan di kamung kita ini”.

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan sekertaris kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai sekertaris kampung man way bob saya Membuat rencana anggaran yang jelas berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, dan Memastikan semua dana desa yang tersedia dikumpulkan dan dicatat dengan benar. Mengalokasikan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, dengan memprioritaskan proyek dan program yang memberikan manfaat langsung bagi penduduk kampung. saya Menyediakan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa. kemudian Melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi penggunaan dana. dan juga Melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area perbaikan.”

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan kaur pembangunan kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai kaur pembangunan Mulailah dengan menyusun rencana anggaran yang jelas berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan kampung. Selalu dokumentasikan setiap penggunaan dana secara rinci dan transparan untuk mempermudah pemantauan dan audit. kami juga Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar memenuhi kebutuhan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. kemudian Lakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek dan evaluasi terhadap penggunaan dana untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. lalu Sampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah kabupaten atau distrik serta kepada masyarakat tentang penggunaan dana dan kemajuan proyek-proyek pembangunan. dan Jalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga keuangan atau ahli teknis, untuk mendukung pengelolaan dana yang lebih efektif dan profesional.”

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan kaur umum kampung Man Way Bob:

“menurut saya, sejauh ini pemerintah kampung sudah memberikan yang terbaik untuk kampung terutama mengenai pengelolaan dana desa”.

Pelaksanaan adalah tahap kritis dalam proses manajemen yang melibatkan eksekusi rencana yang telah di susun untuk mencapai tujuan organisasi. pelaksanaan yang efektif memerlukan koordinasi, komunikasi, dan pengendalian yang tepat. Dalam menunjang pembangunan kampung Man Way Bob distrik muting. pemerintah kampung telah membuat beberapa program kerja, namun tidak begitu memperhatikan keberlanjutan jangka panjang dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun Beberapa pelaksanaan program kerja di kampung Man Way Bob tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan serta di butuhkan oleh masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun

pelaksanaan program, sehingga program yang dijalankan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil warga kampung. Selain itu, lemahnya mekanisme evaluasi dan monitoring turut menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan. Beberapa program bahkan terhenti di tengah jalan karena kurangnya sumber daya, baik dari segi pendanaan, tenaga kerja, maupun dukungan teknis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan pendekatan yang lebih partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pemerintah kampung bersama pemangku kepentingan terkait harus membuka ruang dialog yang inklusif agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur kampung dalam hal manajemen program, transparansi anggaran, dan pelaporan hasil juga menjadi kunci agar pelaksanaan program kerja ke depan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kampung Man Way Bob.

4.4. Penatausahaan

Tahap penataan usaha atau organizational structuring adalah proses merancang dan mengatur bagaimana suatu organisasi atau perusahaan akan diatur agar efisien dalam mencapai tujuannya. Teori ini melibatkan beberapa konsep Utama, Organisasi dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, produk, geografi, atau pelanggan. Pemilihan jenis departementalisasi ini tergantung pada tujuan perusahaan dan kompleksitas operasionalnya.

Berikut ini wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai kepala kampung saya melakukan perencanaan secara cermat untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan mendesak dan aspirasi masyarakat, menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa dengan melakukan rapat terbuka dan menyediakan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat. melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka. memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Dana desa kami alokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, air

bersih, dan juga untuk meningkatkan pelayanan public seperti kesehatan dan pendidikan.”

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan bamuskam kampung Man Way Bob:

“saya selalu mengikuti musyawarah kampung man way bob dan selalu ikut serta dalam kegiatan yang di selenggarakan pemerintahan kampung, mengenai pengelolaan dana kampung adek bisa liat sendiri bagaimana pembangunan di kamung kita ini”.

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan sekertaris kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai sekertaris kampung man way bob saya Membuat rencana anggaran yang jelas berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, dan Memastikan semua dana desa yang tersedia dikumpulkan dan dicatat dengan benar. Mengalokasikan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, dengan memprioritaskan proyek dan program yang memberikan manfaat langsung bagi penduduk kampung. saya Menyediakan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa. kemudian Melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi penggunaan dana. dan juga Melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area perbaikan.”

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan kaur pembangunan kampung Man Way Bob:

“sebagai kaur pembangunan Mulailah dengan menyusun rencana anggaran yang jelas berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan kampung. Selalu dokumentasikan setiap penggunaan dana secara rinci dan transparan untuk mempermudah pemantauan dan audit. kami juga Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar memenuhi kebutuhan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. kemudian Lakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek dan evaluasi terhadap penggunaan dana untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. lalu Sampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah kabupaten atau distrik serta kepada masyarakat tentang penggunaan dana dan kemajuan proyek-proyek pembangunan. dan Jalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga keuangan atau ahli teknis, untuk mendukung pengelolaan dana yang lebih efektif dan profesional.”

Penatausahaan atau administrasi dalam konteks modern terus berkembang dengan adanya kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan lingkungan kerja. Pendekatan terbaru dalam administrasi menekankan pada fleksibilitas, penggunaan teknologi, dan manajemen berbasis data.

Penatausahaan di kantor kampung Man Way Bob distrik muting dalam pengelolaan administrasi belum dapat dikelola dengan baik, di karenakan kurangnya ketersediaan fasilitas dalam pengelolaan administrasi,serta kurangnya sumber daya manusia, yang tidak dapat mengoperasikan komputer.

Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta kurang optimalnya pencatatan dan pelaporan kegiatan pemerintahan kampung. Banyak dokumen yang masih dikelola secara manual, yang rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, dan kesulitan dalam pencarian arsip. Selain itu, tidak tersedianya jaringan internet yang memadai juga menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem administrasi berbasis digital.

Untuk meningkatkan kualitas penatausahaan di Kantor Kampung Man Way Bob, diperlukan upaya serius dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak administrasi yang sesuai. Disamping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang tidak kalah penting, melalui pelatihan dasar komputer, pengelolaan data digital, serta pemahaman terhadap prosedur administrasi yang efisien dan akuntabel.

Transformasi penatausahaan ini penting agar pengelolaan administrasi kampung dapat berjalan secara efektif, transparan, dan mampu mendukung proses pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

4.5. Pelaporan hingga pertanggung jawaban

Pelaporan hingga tanggung jawab merupakan proses yang penting dalam pengelolaan informasi dan tindakan di berbagai konteks, seperti organisasi, pemerintahan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah teori umum mengenai tahap-tahap tersebut, Tahap awal dalam proses pelaporan adalah mengidentifikasi masalah atau informasi yang penting untuk dilaporkan. Ini bisa berupa masalah operasional, kepatuhan, atau situasi yang memerlukan tindakan atau perhatian lebih lanjut.

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan kepala kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai kepala kampung saya melakukan perencanaan secara cermat untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan mendesak dan aspirasi masyarakat, menjaga transparansi dalam penggunaan dana desa dengan melakukan rapat terbuka dan menyediakan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat. melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka. memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Dana desa kami alokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan juga untuk meningkatkan pelayanan public seperti kesehatan dan pendidikan.”

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan bamuskam kampung Man Way Bob:

“saya selalu mengikuti musyawarah kampung man way bob dan selalu ikut serta dalam kegiatan yang di selenggarakan pemerintahan kampung, mengenai pengelolaan dana kampung adek bisa liat sendiri bagaimana pembangunan di kamung kita ini”.

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan sekertaris kampung Man Way Bob:

“iya dek, sebagai sekertaris kampung man way bob saya Membuat rencana anggaran yang jelas berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, dan Memastikan semua dana desa yang tersedia dikumpulkan dan dicatat dengan benar. Mengalokasikan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, dengan memprioritaskan proyek dan program yang memberikan manfaat langsung bagi penduduk kampung. saya Menyediakan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa. kemudian Melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi penggunaan dana. dan juga Melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area perbaikan.”

Berikut ini wawancara yang di lakukan peneliti dengan kaur pembangunan kampung Man

Way Bob:

“iya dek, sebagai kaur pembangunan Mulailah dengan menyusun rencana anggaran yang jelas berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan kampung. Selalu dokumentasikan setiap penggunaan dana secara rinci dan transparan untuk mempermudah pemantauan dan audit. kami juga Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar memenuhi kebutuhan dan

mendukung pembangunan yang berkelanjutan. kemudian Lakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek dan evaluasi terhadap penggunaan dana untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. lalu Sampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah kabupaten atau distrik serta kepada masyarakat tentang penggunaan dana dan kemajuan proyek-proyek pembangunan. dan Jalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga keuangan atau ahli teknis, untuk mendukung pengelolaan dana yang lebih efektif dan profesional.”

Pelaporan hingga pertanggung jawaban adalah elemen kunci dalam manajemen organisasi. Pelaporan melibatkan pengumpulan, analisi, dan penyampaian informasi tentang kinerja organisasi. Pertanggung jawaban adalah proses dimana individu atau organisasi mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil yang di capai. kedua konsep ini penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan di kampung Man Way Bob tidak transparansi kepada masyarakat, Tidak ada mekanisme atau informasi tentang bagaimana pengeluaran dikendalikan, Tidak ada penjelasan mengenai pengawasan dan evaluasi setelah pelaksanaan program penggunaan dana kampung, Keterangan pengeluaran terlalu singkat dan tidak menjelaskan secara rinci, Tidak adanya bukti akuntabilitas membuat masyarakat sulit untuk menilai apakah pengeluaran dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai peraturan atau tidak.

Situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan dana kampung. Minimnya keterbukaan dalam pelaporan membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak memiliki kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Ketiadaan dokumen pendukung seperti laporan keuangan rinci, kuitansi, dan bukti transaksi lainnya semakin memperburuk kondisi, karena membuka celah bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Untuk menciptakan tata kelola kampung yang bersih dan bertanggung jawab, dibutuhkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah kampung perlu menetapkan prosedur standar pelaporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Laporan keuangan harus disusun secara periodik, diumumkan secara terbuka, dan

dilengkapi dengan bukti fisik maupun digital yang dapat diakses publik.

Selain itu, dibutuhkan penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal, termasuk melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tokoh masyarakat, serta lembaga pendamping. Dengan adanya pelaporan yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung akan meningkat, serta menciptakan budaya pengelolaan dana desa yang lebih sehat dan berorientasi pada kesejahteraan warga Kampung Man Way Bob.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian mengenai alokasi dana kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Man Way Bob Distrik Muting Kabupaten Mereauke. Hal tersebut dapat di lihat dengan beberapa indikator, sebagai berikut.

Pengelolaan alokasi dana kampung yang baik melibatkan pendekatan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, dana kampung dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana kampung memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan.

6. Referensi

- [1] Alcock, P., Haux, T., & Wright, S. (2019). *Social policy and welfare*. Routledge.
- [2] Aprilia, K. (2021). *Analisis pengelolaan dana desa dalam menunjang pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar).
- [3] Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk kecamatan dan desa*. Jakarta: Erlangga.
- [4] Brodjonegoro, B. (2014). *Pengelolaan dana desa untuk pembangunan daerah* [Makalah].
- [5] Buchsbaum, L. (2019). *Justice and the American metropolis*. Routledge.
- [6] Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan kapasitas kebijakan dana desa dalam mengentaskan kemiskinan.

JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 3(1).

[7] Hidayat, D. N. (2003). *Paradigma dan metodologi penelitian sosial empirik klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.

[8] Iqbal, M. (2016). *Manajemen keuangan desa*.

[9] Jaya, I. M. L. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.

[10] Kuncoro, A. (2019). Participatory development and sustainability: Lessons from community-driven programs in Indonesia. *Sustainability*, 11(14), 3941. <https://doi.org/10.3390/su11143941>

[11] Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*.

[12] Matarasso, F. (2019). *A restless art: How participation transforms people and communities*. Calouste Gulbenkian Foundation.

[13] Midgley, J. (2018). *Social welfare in global context*. SAGE Publications.

[14] Nasution, A. (2019). Human resource development in village governance: A case study in Indonesia. *Human Resource Development International*, 22(3), 305–322.

[15] Nugroho, A. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Suatu kajian konsep dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 29(2), 95–102.

[16] Nurohman, Y. A., Sari, R. Q., & Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada desa wisata Menggoro. *Jurnal Magisma*. <http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/jurnal/index.php/magisma/article/view/38>

[17] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Daerah.

[18] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

[19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

[20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

[21] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[22] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[23] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

[24] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

[25] Rismayanti, R. (2022). *Implementasi kebijakan dana desa di Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis*.

[26] Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1984). *Decentralization in developing countries*. World Bank.

[27] Syukri, M., Sagala, P., & Sahide, M. A. K. (2013). *Mengelola dana desa: Pembelajaran dari pengalaman daerah*. Jakarta: Seknas FITRA.

[28] Taufik, A. (2015). *Dana desa: Menuju keberdayaan masyarakat desa*.

- [29] Telaumbanua, A., & Noferius, Z. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *BRIN*. <http://karya.brin.go.id/id/eprint/15265/>
- [30] Tirtanadi, K. (2016). Mengkaji implementasi kebijakan dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Muqoddimah*. <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/2560>
- [31] Uamang, A. (2018). Implementasi otonomi khusus Provinsi Papua dalam ketahanan wilayah NKRI di Pemerintahan Kabupaten Mimika. *Jurnal Reformasi*. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/925>
- [32] Zitri, I., Rifaid, & Yudhi, L. (2020). Implementasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi kasus Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Good Local Governance and Public Transformation (JGLP)*. <https://journal.unpacti.ac.id/JGLP/article/view/60>